AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN : 2964-6332
e-ISSN : 2964-6340

Terindeks : Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i4.4229

PSIKOEDUKASI MENGENAI MUSYAWARAH MUFAKAT SEBAGAI PERWUJUDAN DEMOKRASI PANCASILA PADA SISWA DI SMP MARDI WALUYA

Psychoeducation on Consultation as a Manifestation of Pancasila Democracy for Students at Mardi Waluya Junior High School

Ellena Kristy[1], Viona Grace[2], Patricia Helga[3], Adelia Lovela[4], Silviana[5], Raja Oloan Tumanggor[6]
Universitas Tarumanagara Jakarta
ellena.705210104@stu.untar.ac.id; viona.705210032@stu.untar.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Oct 29, 2024	Nov 13, 2024	Nov 25, 2024	Dec 1, 2024

Abstract

The Community Service (PKM) activity held at SMP Mardi Waluya Cibinong on November 22, 2024 aims to provide education on consensus as a manifestation of Pancasila Democracy in the school environment. This activity was attended by 206 grade VIII students divided into five groups. The method used in this activity is psychoeducation, which involves presentation techniques, group discussions, and interactive games. The activity began with a presentation of material on the importance of the value of consensus in everyday life, followed by a group discussion session to hone communication and tolerance skills. In closing, the interactive game session tested students' understanding of the concept of consensus. The results of this activity show that psychoeducation succeeded in introducing the concept of consensus in a practical and interesting way, as well as providing students with a better understanding of the application of Pancasila values in everyday life, especially in the school environment.

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Through this activity, it is expected that students can internalize the value of consensus and make it a part of their attitudes and behavior in their social life.

Keywords: Psychoeducation; Consensus; Democracy; Pancasila

Abstrak: Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di SMP Mardi Waluya Cibinong pada 22 November 2024 bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai musyawarah mufakat sebagai perwujudan Demokrasi Pancasila di lingkungan sekolah. Kegiatan ini diikuti oleh 206 siswa kelas VIII yang terbagi dalam lima kelompok. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah psikoedukasi, yang melibatkan teknik presentasi, diskusi kelompok, dan permainan interaktif. Kegiatan dimulai dengan pemaparan materi mengenai pentingnya nilai musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari, dilanjutkan dengan sesi diskusi kelompok untuk mengasah keterampilan komunikasi dan toleransi. Sebagai penutup, sesi permainan interaktif menguji pemahaman siswa mengenai konsep musyawarah mufakat. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa psikoedukasi berhasil memperkenalkan konsep musyawarah mufakat secara praktis dan menarik, serta memberikan pemahaman yang lebih baik kepada siswa mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam lingkungan sekolah. Melalui kegiatan ini, diharapkan siswa dapat menginternalisasi nilai musyawarah mufakat dan menjadikannya sebagai bagian dari sikap dan perilaku dalam kehidupan sosial mereka

Kata Kunci: Psikoedukasi; Musyawarah Mufakat; Demokrasi; Pancasila

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun karakter generasi muda yang berdaya saing, berintegritas, dan berakar pada nilai-nilai kebangsaan. Dalam konteks Indonesia, Pancasila bukan hanya menjadi dasar negara, tetapi juga pedoman moral yang mencerminkan identitas bangsa. Salah satu nilai fundamental yang terkandung dalam Pancasila adalah musyawarah mufakat, sebagaimana tercantum dalam sila keempat (Saragih & Ndano, 2024). Nilai ini bukan sekadar konsep abstrak, melainkan harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pendidikan yang sistematis dan terintegrasi. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi, muncul kesenjangan dalam pemahaman dan penerapan nilai-nilai musyawarah, terutama di kalangan siswa (Apriyanti et al., 2023). Oleh karena itu, penting bagi lembaga pendidikan untuk mengambil peran aktif dalam menjembatani kesenjangan ini, sehingga nilai-nilai Pancasila dapat terus diwariskan dan diinternalisasi oleh generasi muda.

Pendidikan demokrasi Pancasila, terutama dalam konsep musyawarah mufakat, memegang peranan fundamental dalam pembentukan karakter generasi muda. Sebagai landasan etis dan filosofis, musyawarah mufakat mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, toleransi, serta kemampuan menyelesaikan perbedaan secara damai dan konstruktif (Salsabila

& Auliadi, 2024). Hal ini selaras dengan sila keempat Pancasila yang mengedepankan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Pendidikan mengenai musyawarah mufakat menjadi lebih relevan dalam menghadapi tantangan kehidupan sosial yang semakin kompleks, dimana interaksi antar individu sering kali menimbulkan konflik kepentingan. Dengan memperkenalkan nilai-nilai demokrasi berbasis musyawarah, siswa diajarkan untuk mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan individu, mengasah kemampuan komunikasi, dan menumbuhkan empati terhadap orang lain. Dalam jangka panjang, hal ini akan membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bijak dalam bersikap dan berperilaku di tengah masyarakat (Suyahmo, 2015).

Namun, implementasi nilai-nilai ini di kalangan generasi muda, khususnya siswa SMP, menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah pengaruh globalisasi. Era digital dan arus informasi yang tidak terbendung telah membawa masuk budaya-budaya baru yang sering kali bertentangan dengan nilai-nilai lokal dan kebangsaan. Globalisasi yang ditandai dengan penetrasi teknologi, media sosial, dan budaya konsumerisme sering kali mendorong gaya hidup individualistik yang bertolak belakang dengan semangat kebersamaan dan gotong-royong. Siswa SMP, yang berada dalam fase perkembangan psikologis kritis, rentan terpapar oleh tren ini tanpa memiliki filter nilai yang memadai. Akibatnya, banyak siswa yang kurang memahami atau bahkan mengabaikan pentingnya konsep musyawarah mufakat, baik dalam kehidupan sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari (Harahap et al., 2023). Hal ini berpotensi menciptakan generasi yang lebih mementingkan kepentingan pribadi, kurang toleran, dan kurang mampu menyelesaikan konflik secara damai.

Untuk mengatasi tantangan ini, pendidikan demokrasi berbasis musyawarah mufakat harus diintegrasikan dalam kurikulum sekolah serta didukung oleh kegiatan ekstrakurikuler seperti psikoedukasi. Psikoedukasi ini dirancang untuk memperkenalkan nilai-nilai musyawarah dengan cara yang relevan dan menarik bagi siswa (Suhartono, 2019). Dengan demikian, pendidikan musyawarah mufakat tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi juga menjadi praktik yang nyata, yang mampu membentuk kebiasaan siswa dalam bertindak dan berpikir sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Kesenjangan pemahaman siswa mengenai nilai musyawarah mufakat menjadi salah satu isu yang perlu mendapat perhatian serius, terutama dalam konteks pembentukan karakter generasi muda Indonesia. Banyak siswa yang kurang memahami konsep mendasar

dari musyawarah, baik secara filosofis maupun praktis, sehingga pola komunikasi mereka cenderung individualis atau bahkan konfrontatif. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan untuk mendahulukan kepentingan pribadi, ketidakmampuan untuk mendengarkan pendapat orang lain secara aktif, dan kecenderungan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang tidak konstruktif (Budiwibowo, 2013). Kesenjangan pemahaman ini tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial siswa di lingkungan sekolah tetapi juga pada interaksi mereka di masyarakat yang lebih luas, di mana kemampuan untuk berkomunikasi dan bekerja sama menjadi sangat penting. Tanpa adanya pemahaman dan penerapan nilai-nilai musyawarah yang kuat, siswa berisiko kehilangan kemampuan untuk membangun hubungan sosial yang harmonis dan berkontribusi secara positif terhadap masyarakat.

Dalam konteks kebangsaan, kesenjangan ini juga menjadi tantangan besar terhadap implementasi sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Pancasila sebagai dasar negara bukan hanya simbol, tetapi juga panduan hidup yang harus diinternalisasi oleh seluruh warga negara. Nilai-nilai musyawarah yang terkandung dalam sila ini mencerminkan pentingnya pengambilan keputusan yang melibatkan semua pihak secara adil, dengan menekankan kebersamaan dan semangat gotong-royong. Namun, tanpa pendidikan yang memadai, konsep ini berisiko hanya menjadi teks formal yang jauh dari kenyataan praktik sehari-hari. Dengan menanamkan nilai-nilai musyawarah sejak dini, siswa tidak hanya diajarkan tentang teori demokrasi Pancasila, tetapi juga bagaimana menerapkannya dalam kehidupan nyata, baik dalam lingkup kecil seperti kelas maupun dalam konteks yang lebih luas seperti masyarakat (Ilmah et al., 2024).

Peran lembaga pendidikan, terutama sekolah, menjadi sangat strategis dalam menjembatani kesenjangan ini. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pusat pembentukan karakter. Melalui pendidikan formal dan kegiatan pendukung seperti psikoedukasi, siswa dapat diperkenalkan secara mendalam kepada konsep musyawarah mufakat dan dilatih untuk menerapkannya secara praktis. Psikoedukasi, misalnya, dapat dirancang dalam bentuk lokakarya, simulasi, atau diskusi kelompok yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi dan penyelesaian konflik secara damai (Suhartono, 2019). Selain itu, sekolah juga dapat memanfaatkan mata pelajaran seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai platform untuk mengintegrasikan nilai-nilai musyawarah secara sistematis. Dengan pendekatan ini, sekolah dapat menjadi katalisator dalam membangun generasi muda yang tidak hanya memahami

nilai-nilai Pancasila, tetapi juga mampu menerapkannya sebagai identitas bangsa yang kuat di tengah tantangan globalisasi

Sebagai penjaga warisan budaya dan identitas bangsa, peran pendidikan dalam menanamkan nilai musyawarah mufakat tidak dapat diabaikan. Dengan mengintegrasikan konsep ini ke dalam kurikulum dan aktivitas pendidikan, siswa tidak hanya diajarkan tentang teori, tetapi juga dilatih untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadi semakin penting di tengah tantangan globalisasi yang membawa berbagai pengaruh eksternal yang berpotensi mengikis nilai-nilai lokal. Melalui pendidikan yang holistik dan berkesinambungan, siswa dapat menjadi agen perubahan yang mampu menjaga harmoni sosial, menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif, dan memperkuat identitas kebangsaan (Althafullayya, 2024). Dengan demikian, pendidikan musyawarah mufakat tidak hanya mencetak individu yang unggul secara akademis, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih toleran, adil, dan demokratis di masa depan.

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di SMP Mardi Waluya Cibinong bertujuan memberikan edukasi mengenai musyawarah mufakat sebagai perwujudan Demokrasi Pancasila di lingkungan sekolah. Sebelum pelaksanaan, kelompok melakukan sosialisasi dengan pihak sekolah untuk menentukan jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan guru yang menjadi narahubung. Kelompok juga menyerahkan proposal kegiatan beserta surat pengantar resmi dari kampus sebagai bagian dari persiapan administrasi.

Kegiatan psikoedukasi dilaksanakan pada Jumat, 22 November 2024, dimulai pada pukul 08.30 hingga 10.50. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab menyampaikan materi presentasi di kelas masing-masing. Kegiatan ini diikuti oleh 206 siswa kelas VIII, yang terbagi dalam lima kelas dengan jumlah siswa per kelas berkisar antara 38-42 orang. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah psikoedukasi, yang mencakup teknik presentasi materi, diskusi kelompok, dan sesi game interaktif.

Kegiatan diawali dengan sesi perkenalan untuk menciptakan suasana interaktif, dilanjutkan dengan pemaparan materi yang berlangsung selama 30 menit dengan judul "Musyawarah Mufakat sebagai Perwujudan Demokrasi Pancasila dalam Lingkup Sekolah". Materi tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya nilai musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah. Setelah

materi disampaikan, siswa diberikan waktu istirahat selama 40 menit. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi kelompok yang berlangsung selama 1 jam. Siswa dibagi menjadi lima kelompok, masing-masing terdiri dari 7-9 orang. Setiap kelompok diberi kesempatan untuk memilih ketua dan mendiskusikan empat pertanyaan yang telah disiapkan. Sebagai penutup, kegiatan dilanjutkan dengan permainan interaktif berupa pertanyaan singkat seputar materi yang telah disampaikan. Permainan ini dirancang untuk menguji pemahaman dan melibatkan partisipasi aktif dari para siswa Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat implementasi nilai sila ke-4 Pancasila, yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat, dalam kehidupan sehari-hari siswa. Kelompok yang paling aktif dan mampu menjawab pertanyaan dengan tepat akan mendapatkan hadiah sebagai bentuk apresiasi. Kegiatan ditutup dengan sesi dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini menggunakan metode psikoedukatif, yaitu pendekatan yang bertujuan memberikan informasi dan pemahaman untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta. Lukens dan McFarlane (2004) menjelaskan bahwa psikoedukasi merupakan pendekatan berbasis kognitif dan perilaku yang menggabungkan teori, diskusi, dan praktik langsung guna memperluas wawasan peserta.

Kelompok telah melaksanakan kegiatan PKM psikoedukasi pada Jumat, 22 November 2024, di SMP Mardi Waluya Cibinong, dengan melibatkan 206 siswa kelas VIII yang terbagi dalam lima kelas. Mengusung tema "Musyawarah Mufakat sebagai Perwujudan Demokrasi Pancasila dalam Lingkup Sekolah," kegiatan ini memberikan pengalaman berharga bagi siswa dalam memahami dan menerapkan konsep musyawarah mufakat serta nilai-nilai demokrasi Pancasila, khususnya di lingkungan sekolah.

Pemaparan materi disampaikan dalam bentuk presentasi yang mencakup poin-poin utama seperti definisi musyawarah mufakat, perwujudan demokrasi Pancasila, langkah-langkah melaksanakan musyawarah, pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan bersama, manfaat dan tujuan musyawarah, kelebihan serta kelemahannya, tokoh-tokoh terkenal yang memiliki kemampuan musyawarah, hingga contoh implementasi musyawarah mufakat di lingkungan sekolah. Menurut Yulianingsih (2017), kegiatan edukasi yang berbasis

nilai-nilai lokal dapat memperkuat ikatan emosional siswa terhadap budaya bangsa dan meningkatkan rasa cinta tanah air.

Setelah penyampaian materi, siswa dibagi menjadi lima kelompok, masing-masing terdiri dari 7-9 orang. Setiap kelompok diminta memilih ketua dan mendiskusikan empat pertanyaan yang telah disiapkan, yaitu pengertian demokrasi Pancasila, pengertian musyawarah mufakat, langkah-langkah bermusyawarah, dan cara mengatasi kelemahan dalam musyawarah mufakat. Sesi ini bertujuan mendorong siswa untuk mengimplementasikan nilai-nilai musyawarah mufakat melalui diskusi yang melibatkan komunikasi, penyampaian pendapat, dan penghargaan terhadap pandangan orang lain. Melalui interaksi dalam diskusi kelompok, siswa dapat merasakan pentingnya kerja sama, saling menghargai pendapat, dan mencapai kesepakatan bersama secara demokratis.

Sebagai bentuk evaluasi, kegiatan dilanjutkan dengan permainan interaktif berupa pertanyaan singkat terkait materi yang telah disampaikan. Permainan ini dirancang untuk menguji pemahaman siswa secara lebih santai dan menyenangkan, sekaligus memperkuat penerapan nilai musyawarah untuk mencapai mufakat, sesuai dengan sila ke-4 Pancasila.

Melalui kombinasi materi edukatif, diskusi interaktif, dan refleksi, kegiatan ini menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan mendalam. Siswa tidak hanya memahami konsep demokrasi Pancasila dan musyawarah mufakat, tetapi juga mempraktekkannya secara langsung dalam kelompok. Hal ini menjadi langkah penting dalam membangun generasi muda yang mampu menghargai perbedaan, menjunjung tinggi nilai musyawarah, dan bangga akan identitas kebangsaan mereka. Sebagaimana dinyatakan oleh Andre (2019), program edukasi yang dirancang untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan berperan penting dalam membentuk individu yang toleran dan peduli terhadap keberagaman bangsa.

Definisi Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu "demos" (rakyat) dan "kratein" (kekuasaan). Abraham Lincoln, salah satu tokoh terkenal, mendefinisikan demokrasi sebagai suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berdasarkan hal tersebut, demokrasi dapat dipahami sebagai sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pusat segala keputusan. Demokrasi Pancasila, khususnya, adalah sistem politik di Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara (Rangkuti, 2023).

Musyawarah Mufakat dalam Demokrasi Pancasila

Salah satu pilar utama dalam demokrasi Pancasila adalah musyawarah mufakat, yang tercermin dalam sila ke-4 Pancasila: "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan." Sila ini menegaskan bahwa musyawarah merupakan cara penting dalam pengambilan keputusan bersama. Tujuan dari musyawarah adalah untuk mencapai mufakat, yaitu kesepakatan bersama yang didasarkan pada kepentingan bersama. Dengan demikian, musyawarah mufakat tidak hanya menyelesaikan persoalan bersama, tetapi juga menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, sesuai dengan prinsip Demokrasi Pancasila.

Pengertian Musyawarah dan Mufakat

Musyawarah adalah proses membahas suatu masalah bersama untuk mencapai kesepakatan, sedangkan mufakat adalah hasil dari musyawarah tersebut (Permatasari & Seftyono, 2014). Dalam proses ini, keputusan diambil melalui diskusi dan perundingan untuk memecahkan masalah dan menemukan jalan keluar demi mencapai kesepakatan bersama. Terdapat langkah-langkah dalam musyawarah mufakat, yaitu:

1. Menentukan masalah, dengan menentukan permasalahan yang akan dibahas;
2. Mengumpulkan informasi yang relevan dengan masalah yang ingin diselesaikan;
3. Menyampaikan pendapat, di mana setiap individu berhak menyampaikan pendapatnya secara terbuka;
4. Mendengarkan pendapat orang lain, yang merupakan bagian dari penghargaan dalam demokrasi;
5. Mencari titik temu melalui pengumpulan informasi dan pendapat kelompok;
6. Mengambil keputusan setelah tercapai kesepakatan kelompok.

Menurut Nurwardani et al. (2016), tujuan musyawarah adalah untuk mencapai mufakat, memberikan kesempatan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang, serta membentuk rakyat yang harmonis dan memiliki semangat kebersamaan. Musyawarah mufakat juga memiliki manfaat penting, seperti meningkatkan rasa percaya diri dalam menyampaikan pendapat, meningkatkan keterampilan komunikasi efektif, dan membentuk karakter yang demokratis, toleran, dan bertanggung jawab (Al.Tridonanto, 2014).

Kelebihan dan Kekurangan Musyawarah Mufakat

Musyawarah mufakat memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya. Kelebihan musyawarah adalah semua pihak merasa dihargai dan diikutsertakan dalam pengambilan keputusan, sehingga hasil yang dicapai terasa sebagai bagian dari kepentingan bersama, menghindari klaim kebenaran pribadi. Namun, pelaksanaan musyawarah juga menghadapi kekurangan, seperti proses pengambilan keputusan yang memakan waktu lama dan kemungkinan pihak minoritas yang tidak setuju, yang dapat menghambat tercapainya keputusan. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memiliki sikap saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain agar musyawarah dan mufakat dapat tercapai.

Implementasi Musyawarah Mufakat di Lingkungan Sekolah

Di lingkungan sekolah, musyawarah mufakat dapat diterapkan dalam berbagai situasi, antara lain:

1. Pemilihan ketua kelas, di mana semua siswa memiliki hak untuk mengusulkan calon dan memberikan pendapatnya masing-masing;
2. Pembagian tugas kelompok, di mana setiap anggota harus berdiskusi untuk menentukan pembagian tugas secara adil;
3. Pengambilan keputusan kelas, seperti saat akan mengadakan acara, di mana semua siswa berhak memberikan saran.

Tokoh-Tokoh yang Menghargai Musyawarah Mufakat

Dalam sejarah, terdapat beberapa tokoh yang dikenal karena kemampuan mereka dalam musyawarah dan mufakat. Presiden pertama Indonesia, Soekarno, sering mengadakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam menghadapi berbagai masalah politik dan sosial di masa perjuangan kemerdekaan. Mohammad Hatta, yang terlibat dalam perumusan dasar negara Indonesia, termasuk penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, juga memperlihatkan peran penting dalam musyawarah. Selain itu, Nelson Mandela, yang memimpin perjuangan melawan apartheid di Afrika Selatan, dikenal karena kemampuannya dalam memimpin melalui musyawarah dan rekonsiliasi, mengajak seluruh rakyat untuk berdialog demi kesatuan bangsa.

Dalam pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang diadakan di SMP Mardi Waluya Cibinong, siswa-siswi menunjukkan keterlibatan yang sangat baik dan

pemahaman yang mendalam terhadap materi yang disampaikan. Setiap kelompok mampu mempresentasikan hasil diskusinya dengan jawaban yang tepat. Selain itu, siswa-siswi juga menunjukkan antusiasme yang tinggi dengan aktif berpartisipasi dalam sesi game interaktif, yang semakin memperdalam pemahaman mereka. Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil mendorong siswa untuk tidak hanya memahami tetapi juga mengaplikasikan nilai-nilai yang diajarkan, serta meningkatkan keterampilan komunikasi dan kerjasama tim yang baik.

KESIMPULAN

Kegiatan PKM yang dilaksanakan di SMP Mardi Waluya sejalan dengan kurikulum pendidikan, khususnya pada mata pelajaran P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila) yang membahas tema Suara Demokrasi. Materi yang dipaparkan oleh kelompok mengenai Demokrasi Pancasila selaras dengan pembelajaran yang akan diterima oleh siswa kelas 8. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh salah satu guru yang menjadi narahubung. Selama sesi presentasi, seluruh siswa dari lima kelas menyimak dengan baik, bahkan beberapa siswa mencatat materi yang disampaikan. Pada saat sesi diskusi kelompok, siswa menunjukkan antusiasme yang tinggi, baik dalam diskusi kelompok maupun sesi interaktif dengan menjawab pertanyaan terkait materi yang dipaparkan. Melalui diskusi kelompok, siswa berhasil mengimplementasikan nilai musyawarah mufakat dengan baik, menghasilkan jawaban yang relevan dan sesuai dengan materi yang telah dijelaskan. Selain itu, siswa juga terlihat saling menghargai perbedaan pendapat serta jawaban yang dipresentasikan oleh perwakilan kelompok. Keseluruhan kegiatan psikoedukasi mengenai "Musyawarah Mufakat sebagai Perwujudan Demokrasi Pancasila" ini dapat disimpulkan berhasil dan berjalan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan oleh antusiasme siswa terhadap materi yang disampaikan dan juga seluruh kelompok dapat mewujudkan secara langsung nilai musyawarah mufakat melalui sesi diskusi kelompok yang berjalan dengan kondusif. Terlihat juga para siswa dapat saling menghargai perbedaan cara penyampaian serta jawaban yang dipresentasikan oleh perwakilan kelompok di depan kelas.

Saran untuk siswa SMP Mardi Waluya yaitu agar dapat selalu menerapkan nilai-nilai demokrasi pancasila dalam kehidupan sehari-hari baik disekolah maupun di rumah agar dapat terciptanya kehidupan yang demokratis dan menghindari perpecahan. Serta, saran untuk pihak sekolah SMP Mardi Waluya yaitu agar dapat menanamkan nilai-nilai demokrasi pancasila serta mengimplementasikannya dalam kehidupan disekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Aji, D. S., Yusuf, Y., & Sugiaryo, S. (2022). Peran Guru PPKn Dalam Menumbuh kembangkan Nilai Karakter Demokratis Pada Peserta Didik Kelas IX di SMP Negeri 1 Mojolaban Sukoharjo. Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan, 11(2), 29-36.

Althafullayya, M. R. (2024). Peran Pendidikan Karakter Untuk Generasi Muda Berdaya Tahan dalam Mendukung Ketahanan Nasional: Analisis Holistik. Journal Education Innovation (JEI), 2(1), 163-174.

Al.Tridonanto. (2014). Mengembangkan Pola Asuh Demokratis. Elex Media Komputindo.

Apriyanti, L. S., Dewi, D. A., & Adriansyah, M. I. (2023). Lunturnya Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam Karakter Kaum Muda Sebagai Akibat dari Pengaruh Globalisasi. MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin, 1(3), 560-572.

Budiwibowo, S. (2013). Membangun pendidikan karakter generasi muda melalui budaya kearifan lokal di era global. Premiere Educandum: Jurnal Pendidikan Dasar dan Pembelajaran, 3(01).

Harahap, N. F., Pangaribuan, M., Faisal, M. H., Marbun, T., & Ivanna, J. (2023). Peran pembelajaran IPS dalam pembentukan karakter siswa SMP 35 Medan. Ability: Journal of Education and Social Analysis, 157-166.

Ilmah, N., Tika, A., Pambayun, M. E., & Artharina, F. P. (2024). Nilai-Nilai Pancasila Dalam Lingkungan Sekitar Melalui Pembelajaran PPkn Siswa Kelas 2 SD Negeri Sambirejo 02. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP), 7(3), 9394-9398.

Nurwardani, P., Yoga Saksama, H., Sarifudin Winataputra, U., Budimansyah, D., Sapriya, W., Winarno, M., Mulyono, E., Jukti Prawatyani, S., Almaidah Anwar, A., Evawany, P., Priyautama, F., & Festanto, A. (2016). Pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi (Ristekdikti 2016). Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. https://www.academia.edu/45421624/Pendidikan_Kewarganegaraan_untuk_Perguruan_Tinggi_Ristekdikti_2016

Parnawi, A. (2019). Psikologi belajar. Deepublish.

Permatasari, D., & Seftyono, C. (2014). Musyawarah Mufakat atau Pemilihan Lewat Suara Mayoritas Diskursus Pola Demokrasi di Indonesia. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, 13(2), 1–13. https://doi.org/10.21009/jimd.v13i2.6410

Rangkuti, M. (2023, June 21). Demokrasi Pancasila Pengertian, Ciri, Aspek, Prinsip, dan Penerapannya. Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut. https://fahum.umsu.ac.id/demokrasi-pancasila-pengertian-ciri-aspek-prinsip-dan-penerapannya/

Salsabila, A., & Auliadi, R. (2024). Mediasi di Luar Pengadilan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perkawinan. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 1(10).

Saragih, J., & Ndano, Y. (2024). Sistem Demokrasi (Kebebasan Berpendapat) Masyarakat di Indonesia dalam Perspektif Sila Ke-4. Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan, 2(3), 194-201.

Suhartono, S. (2019). Implementasi Nilai Musyawarah pada Pancasila Melalui Metode Diskusi Kelas dalam Pembelajaran PPKn Kelas IX di SMP Negeri 3 Krian Sidoarjo. Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan, 19(3).

Suyahmo, S. (2015). Model Implementasi Sila Ke 4 "Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan" Sebagai Lokus Pendidikan Demokrasi di SMP Kota Semarang. Jurnal Penelitian Pendidikan, 32(1).